MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA

CRCS

APRIL 2024

DUA SISI KASUS AGAMA

Edisi MURI bulan ini menyajikan berita yang menggembirakan, meskipun ada beberapa yang kurang menggembirakan. Terdapat kemajuan di satu sisi, tetapi ada stagnasi atau bahkan kemunduran pada sisi yang lain. Meskipun lebih banyak berita yang kurang menggembirakan, tetapi kemajuan terjadi pada wajah keagamaan kita, yakni wacana tentang KUA yang akan diupayakan untuk dapat melayani pernikahan semua agama. Kabar gembira ini cukup mengagetkan karena Kemenag sering kali disorot sebagai institusi negara yang dianggap kurang bagus *performance*-nya, tetapi tiba-tiba memunculkan wacana KUA sebagai tempat pelayanan untuk semua agama.

Terdapat empat isu penting yang terekam dalam MURI edisi bulan ini, yaitu isu makin maraknya pelecehan seksual di lembaga agama, khususnya pesantren, permainan simbol agama dalam pemilu 2024, penolakan Banser terhadap pengajian Salafi di Surabaya, dan wacana KUA yang akan melayani pernikahan semua agama. Isu yang relatif sering muncul adalah pelecehan seksual terhadap santriwati di pesantren, meskipun ada juga di lembaga-lembaga agama lain. Isu ini hampir muncul di setiap edisi MURI. Agaknya ini menunjukkan bahwa ada beragam masalah yang ada dalam kehidupan kepesantrenan kita, termasuk dalam kehidupan internal lembaga keagamaan kita. Faktor kharisma *kiai* dan *gus* agaknya memiliki peran terhadap terbukanya kecenderungan maraknya tindakan penyimpangan tersebut. Hal lain yang menarik adalah permainan simbol agama dalam pemilu. Isu ini memang hampir selalu terjadi dalam setiap perhelatan pemilu maupun pilkada. Hampir semua calon memanfaatkan isu agama dalam kampanyenya. Isu yang relatif menarik adalah terulangnya peristiwa penolakan Banser terhadap pengajian Salafi. Sebenarnya penolakan yang sama pernah terjadi beberapa tahun lalu, juga di Surabaya. Isu terakhir adalah wacana KUA untuk semua agama. Isu ini cukup menarik karena ada kaitannya dengan sejarah keberadaan Kemenag dan MUI di Indonesia. Jika dalam sejarahnya, dua lembaga tersebut adalah hadiah untuk umat Islam, tetapi dengan hadirnya wacana

KUA (yang berada di bawah naungan Kemenag) akan melayani pernikahan semua agama menjadi sangat menarik untuk dilihat perkembangannya. Ini merupakan titik poin positif kehidupan keagamaan di Indonesia.

Akhirnya, MURI hadir adalah bertujuan untuk membuka sederet peristiwa yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan di Indonesia. Tujuan ini berlanjut pada keinginan mengajak berkaca pada peristiwa-peristiwa tersebut untuk dijadikan cermin yang memantul untuk merangkai masa depan yang lebih baik, khususnya tentang kehidupan keagamaan. Lebih jauh dari itu, rekaman-rekaman peristiwa ini adalah untuk dapat dilihat secara longitudinal dalam rentang waktu tertentu. Dari penglihatan tersebut, setidaknya akan dilihat lebih utuh tentang bagaimana potret kehidupan keagamaan di Indonesia dalam rentang waktu tertentu. Selamat menikmati! []

BA

DAFTAR ISI

- Dua Sisi Kasus Agama— 2
- “Penjara Suci” yang Tak Lagi Suci— 4
- “Permainan” Simbol Agama dalam Pemilu— 7
- KUA untuk Semua Agama— 10
- Penolakan Banser terhadap Pengajian Salaf — 15

“PENJARA SUCI” YANG TAK LAGI SUCI

ISTILAH “penjara suci” yang disematkan kepada pondok pesantren untuk menggambarakan sebuah tempat bernaung para santri mendalami ilmu, khususnya agama, kini tak lagi benar-benar dapat disebut “suci”. Pasalnya, bangunan yang idealnya menjadi tempat mulia di mana para santri diajarkan tentang akhlak, ilmu, dan agama Islam, justru menjadi sarana melancarkan aksi bejat beberapa oknum amoral. Nilai adab, kesopanan, serta rasa hormat yang digaungkan di pesantren sering kali berpotensi disalahinterpretasikan dan menjadi “senjata” untuk menundukkan santri. Belum lagi kondisi santri yang jauh dari orang tua sebagai wali sekaligus pelindung para santri membuat kasus pencabulan hingga pemerkosaan banyak terjadi di berbagai pesantren di Indonesia.

Dilecehkan Hingga Dipukul Bagian Kepala Oleh Senior

Kasus pelecehan seksual datang dari Pondok Pesantren di Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Seorang santri berinisial MRF (19) dilaporkan karena melakukan pelecehan seksual terhadap adik tingkatnya yang masih berusia 14 tahun. Kejadian ini bermula ketika korban dan temannya hendak beristirahat setelah berjamaah Shubuh. Tepatnya pada hari Kamis, 1 Februari 2024, pelaku memanggil korban untuk diajak masuk ke salah satu kamar asrama yang kosong, sementara teman korban menuju kamar di asramanya. Ketika di dalam kamar, korban diminta untuk memijat punggung paha pelaku lalu tangan korban diarahkan untuk dimasukkan ke dalam celana agar menyentuh alat kelamin pelaku. Sesaat setelahnya, pelaku menghentikan perbuatannya karena mendengar suara santri lain yang hendak masuk kamar asrama. Pelaku lantas menyuruh korban untuk segera pergi ke lantai 2 bangunan gedung asrama yang masih dalam proses pengerjaan. Untuk kedua kalinya, pelaku meminta korban memegang alat kelaminnya dan pelaku mencoba untuk mencium korban. Secepat kilat korban berontak dan menghindar, tetapi

pelaku kemudian memukul korban di bagian kepala sebanyak lima kali. Korban lalu kabur dan melaporkan kejadian ini kepada kedua orang tuanya melalui telepon yang ia pinjam dari salah satu pengajar di pesantren. Atas perbuatannya itu, MRF dijerat dengan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dengan Ancaman hukuman maksimal 15 Tahun penjara.

Berita Selengkapnya

Didiamkan dan Tak Segera Memperoleh Keadilan

Yayasan Bantuan Lembaga Hukum (YBLH) Lentera Serumpun Sebalai (LSS) bersama Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak (Komnas PPA) Bangka Belitung dampingi korban kasus dugaan pelecehan seksual seorang santri di sebuah pesantren di Sungailiat, Kabupaten Bangka. Senin (12/2/2024) orang tua korban N melaporkan kejadian yang menimpa anaknya pada tahun 2023 lalu dengan harapan laporannya segera ditindaklanjuti. Kasus ini terkuak ketika orang tua korban menyadari ada perubahan drastis pada sifat anaknya. Korban yang masih berusia 12 tahun ini semula ceria dan sering bermain bersama saudara-saudaranya. Namun, beberapa waktu belakangan berubah menjadi pemurung dan pemarah. Setelah ditelisik lebih lanjut, ternyata korban telah berulang kali dilecehkan oleh temannya sendiri. Pihak pesantren sempat memediasi antara pihak keluarga korban dan keluarga pelaku. Mirisnya, orang tua korban tidak dibolehkan memasuki ruangan, hanya melihat dari kejauhan ketika pelaku mengakui perbuatannya dengan disumpah Al-Quran. Saat ini, pelaku sudah pindah ke pesantren lain dan berulang kali mencoba untuk mengajak jalur damai. Sebenarnya, kasus ini sudah pernah ditangani Unit PPA Polres Bangka. Kepada psikolog dari Tim PPA Dinas P2KBP3A Bangka, korban sempat menjelaskan kejadian pencabulan yang menimpa dirinya. Tapi laporan di bulan Oktober kala itu tidak digubris lebih lanjut oleh Mapolres Bangka. Laporannya dianggap belum akurat karena tidak memliki bukti lain. Hingga saat ini, orang tua korban terus mengupayakan keadilan hukum bagi anaknya.

Berita Selengkapnya

Kepala Sekolah yang Cabuli Lima Santriwati

Seorang kepala sekolah sekaligus pengajar di sebuah pesantren di

Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dilaporkan ke polisi oleh seorang santri yang didampingi orang tuanya atas tindak kasus pelecehan. Kejadian ini terkuak setelah seorang santri berhasil kabur dari pesantren dan menceritakan kejadian ini kepada orang tuanya pada hari Sabtu malam, 10 Februari. Dari keterangan yang diberikan korban, pelaku berulang kali melecehkan beberapa santri yang masih berusia belasan tahun. Pelaku melakukan aksi bejatnya tidak hanya sekali, tetapi berulang kali dengan cara yang berbeda-beda. Salah satu cara yang digunakan pelaku ketika melancarkan aksi bejatnya adalah dengan masuk ke kamar mandi dan memaksa santriwati membuka pintu yang sebelumnya sudah dikunci. Cara lain yang digunakan adalah dengan menarik sarung yang digunakan korban. Menurut keterangan Kasi Humas Polresta Mamuju, Ipda Herman Basir, korban yang mengonfirmasi total berjumlah lima orang santri yang rata-rata masih 14 hingga 18 tahun. Pelaku yang berinisial J berhasil diamankan Polresta Mamuju pada hari Minggu, 11 Februari 2024.

Berita Selengkapnya

Pengasuh Ponpes dan Anaknya Jadi Tersangka Kasus Pencabulan Santriwati

Lagi-lagi kasus serupa terjadi di sebuah pesantren di Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Pelakunya seorang kyai dari pesantren ini berinisial MD (72) dan putranya FS (37). Mereka diduga telah mencabuli belasan santriwatinya yang masih anak-anak. Empat korban di antaranya telah membuat laporan resmi ke Polres Trenggalek pada Rabu, 13 Maret 2024. Keempat korban saat ini telah didampingi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Trenggalek untuk memulihkan psikologis dan trauma pelecehan yang dilakukan bapak-anak pengasuh pesantren ini. Berdasarkan keterangan para korban, pelaku bermodus menyuruh santri membersihkan kamar atau membersihkan ruang tamu sebelum dilancarkan aksi bejatnya. Saat ini, total santri yang diduga sebagai korban berjumlah 12 orang dan jumlah ini berpotensi akan terus bertambah. Kedua pelaku telah mengakui perbuatannya kepada polisi dan akan segera dilakukan gelar perkara di Polda Jatim.

Berita Selengkapnya

“PERMAINAN” SIMBOL AGAMA DALAM PEMILU

PEMILIHAN Umum atau kerap dipanggil sebagai pesta demokrasi akhirnya terlaksana di Indonesia setelah lima tahun masa jabatan presiden dan wakil presiden serta akhir masa jabatan anggota legislatif. Menariknya, pemilihan umum yang terjadi di Indonesia pada tahun ini bukan hanya membawa hal-hal yang berbau politik, tetapi juga hal-hal yang berbau keagaamaan ikut terbawa ke dalamnya dan bahkan menjadi senjata bagi mereka untuk mengunggulkan kandidat yang mereka pilih. Salah contoh dari hal ini adalah apa yang menjadi simbol agama atau buah dari agama yang menjadi tradisi mengalami perubahan fungsi dan pelaksanaanya. Seperti pada pembukaan perayaan masa Pra-Paskah, Rabu Abu yang jadwal keagamaannya mengalami pergeseran atau pemajuan dari tanggal yang seharusnya perayaan tersebut dilaksanakan. Hal yang sama juga terjadi pada perayaan Imlek serta Cap Go Meh yang “mengalah” demi kelancaran pelaksanaan pemilihan umum ini. Tak berhenti sampai di situ, fungsi dalil yang menjadi simbol agama Islam dijadikan senjata politik demi keuntungan suatu pihak dalam pemilu. Hal ini terlihat dari bagaimana para pendukung calon kandidat menggunakan dalil-dalil dalam agamanya sebagai alat menggaungkan dukungannya pada calon kandidat yang mereka pilih.

Rabu Abu Menjadi “Selasa” Abu

Rabu Abu merupakan hari raya umat Katolik untuk beribadah dan berpuasa yang selalu jatuh di hari Rabu. Penandaan hari ini juga sekaligus menjadi permulaan atau pembukaan masa Pra-Paskah sebagai tanda masa tobat 40 hari sebelum Paskah yang diadakan sebagai misa di gereja. Namun, oleh karena hari Rabu Abu pada tahun ini (2024) bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan umum, maka beberapa keuskupan di Indonesia mengubah jadwal misa. Sebagaimana disampaikan Keuskupan Agung Jakarta (KAJ) bahwa sehubungan dengan perayaan Misa Rabu Abu bagi umat Katolik yang jatuh bersamaan dengan

Pemilu 2024, meminta gereja-gereja paroki KAJ tidak melaksana misa pada 14 Februari pagi hari guna mendukung kesuksesan Pemilu 2024, sehingga jadwal misa dilaksanakan pada hari Selasa, 13 Februari 2024 di sore harinya. Terjadinya pergeseran jadwal misa Rabu Abu juga dilakukan Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Katedral Pontianak. Misa Rabu Abu 2024 di Gereja Katolik Katedral Pontianak akan berlangsung selama lima kali di hari Selasa: semua Jadwal Misa Rabu Abu 2024 berlangsung pada Selasa, 13 Februari 2024. Pihak gereja menyatakan hal ini dilakukan karena perayaan Rabu Abu bertepatan dengan hari pemilu.

Berita Selengkapnya (1)

Berita Selengkapnya (2)

Perayaan Imlek dan Cap Go Meh Tanpa Pawai Naga dan Barongsai

Perayaan Imlek dan Cap Go Meh yang begitu dinanti kemeriahannya harus mengalah di tahun ini. Perayaan yang biasanya diiisi dengan arak-arakkan atau pun atraksi naga dan barongsai kini mengalah untuk tidak dilaksanakan. Walaupun sedikit mengecewakan, hal ini tetap mereka terima lantaran penyelenggaraan pesta demokrasi yang bersamaan dengan tahun baru Imlek. Seperti yang terjadi di Kota Pontianak, tahun ini perayaan Imlek terancam tanpa atraksi Naga/Liong dan Barongsai yang disampaikan langsung oleh Yensen Huang, Ketua Forum Komunikasi Cap Go Meh 2024, dari hasil koordinasi dengan berbagai pihak dalam beberapa waktu terakhir. Kapolresta Pontianak dan juga MABT (Majelis Adat Budaya Tionghoa) juga menyampaikan bahwa arak-arakan naga dan barongsai diganti dengan festival kuliner di jalan Diponegoro dan Mall Ahmad Yani. Hal yang sama juga terjadi di Kota Banda Aceh di mana perayaan Imlek tahun ini meniadakan atraksi barongsai. Tidak diselengarakannya atraksi ini dimaksudkan untuk menghindari penggiringan politik jelang pemungutan suara Pemilu 2024. Mengutip dari kata Ketua Yayasan Vihara Dharma Bhakti Banda Aceh, Yuswar, Sabtu, 10 Februari 2024, oleh karena waktunya berdekatan dengan waktu pemilu, peniadaan atraksi barongsai untuk mengantisipasi agar jangan sampai terjadi penggiringan opini politik dalam kegiatan tersebut, walaupun, menurut Yuswar, penampilan barongsai selalu ditunggu warga Tionghoa setiap perayaan Imlek di Banda Aceh.

Berita Selengkapnya (1)

Berita Selengkapnya (2)

Berita Selengkapnya (3)

Penggunaan Tafsir Surat Ali Imran Ayat 26 dalam Debat PilPres 2024

Politik dan agama tidak seharusnya dicampuradukkan. Dalam pemilihan umum kali ini hal itu nampaknya tidak berlaku lagi. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana penggunaan agama, khususnya simbol agama, digunakan sebagai media atau alat politik demi keuntungan pribadi atau suatu partai. Seperti yang dilakukan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, yang mengutip potongan surat Ali Imran ayat 26 saat memberikan pernyataan penutup dalam debat kelima Pilpres 2024, Minggu, 4 Februari 2024 pada siaran langsung oleh KPU. Berawal dari dirinya yang menceritakan perjalanannya keliling Indonesia kurang lebih satu tahun hingga bagaimana perjumpaannya dengan warga merupakan perjalanan spiritual. Setelah itu, Anies mengutip potongan surat Ali Imran ayat 26 yang berbunyi, "Qulillāhumma mālikal-mulki tu`til-mulka man tasyā`u wa tanzi'ul-mulka mim man tasyā, bahwa Tuhan akan memberikan dan mencabut dari yang dikehendaki," dan membacakan artinya.

Berita Selengkapnya

Membawa Kutipan Ayat Al-Quran Surat Al-Qasas Ayat 26 dalam Kampanye

Hal yang sama juga dilakukan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Kiai Ali Masykur Musa. Dirinya menilai bahwa Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto ialah sosok pemimpin yang amanah dan tegas. Pernyataan ini disampaikannya dalam kata sambutan pada Selasa, 13 Januari 2024, setelah menyaksikan deklarasi Forum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pendukung Prabowo-Gibran dan Aliansi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI) yang keduanya mendukung Prabowo-Gibran di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Ali Masykur Musa mengawali pidatonya dengan merujuk pada ayat Al-Quran surat Al-Qasas ayat 26, yang menjelaskan bahwa pemimpin yang paling baik memimpin sebuah negeri adalah orang yang kuat dan amanah. Dari ayat inilah ia menuturkan dalam perspektif Islam, pasangan Prabowo-Gibran dianggap cocok memimpin Indonesia ke depan. "Orang yang kuat, stronger, yang mempunyai komitmen tinggi, yang nasionalisnya tinggi, orang yang bisa mempertahankan kedaulatan negara tidak lain adalah pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran," jelasnya.

Berita Selengkapnya

KUA UNTUK SEMUA AGAMA

SEBAGAIMANA diketahui, sudah sejak sangat lama, KUA adalah kantor yang secara khusus mengurus urusan umat Islam. kata "agama" yang dimaksud dalam KUA adalah agama Islam. oleh karena itu, KUA tidak mengurus hal-hal yang terkait dengan agama selain Islam, dari pernikahan, pembagian warisan, dan lain-lain. Maka, ketika Menteri Agama mewacanakan KUA akan melayani pernikahan seluruh agama mengundang banyak diskusi baik pro maupun kontra. Barangkali, wacana ini memberi angina segar dalam konteks merawat keragaman dan keharmonisan beragama di Indonesia. Namun, justru menjadi bermasalah bila dikaitkan dengan sejarah adanya Kementerian Agama, MUI, dan juga KUA. Peristiwa-peristiwa berikut merekam diskusi yang terjadi di tingkat masyarakat tentang wacana KUA sebagai tempat pernikahan semua agama.

Menteri Agama: KUA Tempat Mencatat Pernikahan Semua Agama

Menteri Agama, Yaqut Kholil Qoumas, menyampaikan rencana menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai tempat pencatatan pernikahan tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi non-Islam. Pesan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam bertajuk "Transformasi Layanan dan Bimbingan Keagamaan Islam sebagai Fondasi Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan" di Jakarta pada Jum'at (23 Februari 2024). Pengembangan fungsi KUA ini dimaksudkan agar data-data pernikahan dan perceraian agama selain Islam dapat lebih terintegrasi dengan baik. Selama ini, umat non-Islam melakukan pencatatan pernikahan di Kantor Pencatatan Sipil. Padahal, menurut Yaqut, seharusnya itu menjadi urusan Kementerian Agama. Direktur Jenderal Bimas Islam, Kamaruddin Amin, lebih lanjut menyebutkan bahwa rencana sentralisasi pelayanan lintas agama ini akan segera diluncurkan di tahun 2024. Selain menyampaikan rencana pencatatan pernikahan

lintas agama di KUA, Yaqut juga menyampaikan rencana menjadikan KUA sebagai kantor lintas fungsi. Salah satunya dengan mempersilahkan umat non-Islam menggunakan aula-aula yang ada di KUA sebagai tempat ibadah sementara yang masih kesulitan mendirikan rumah ibadah sendiri. KUA akan menjadi Unit Pelaksana Teknis yang multi fungsi, terutama sebagai tempat layanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tugas KUA sebagai instansi terkecil dari Kemenag yang berada di tingkat kecamatan.

Berita Selengkapnya

Apresiasi LSM: Perwujudan Nilai Pancasila

Pengembangan fungsi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan semua agama memperoleh tanggapan-tanggapan positif dari berbagai tokoh dan instansi. Beberapa respons positif, misalnya, datang dari Direktur Eksekutif Diagram Indonesia Center, Nispul Khoiri, yang mengatakan bahwa wacana tersebut merupakan bentuk perwujudan nilai Pancasila, terutama sila kelima. Kementerian Agama adalah kementerian yang menaungi seluruh agama yang diakui di Indonesia, maka seluruh unit yang berada di bawah naungan Kementerian Agama harus mampu secara substantif melayani seluruh agama. Program tersebut dapat mulai dilakukan dengan catatan, perlu mengadakan konsolidasi antarpemuka agama agar pelaksanaan dan implementasinya berjalan dengan lancar. Nispul Khoiri melanjutkan, sentralisasi pelayanan keagamaan bagi seluruh umat agama ini akan menjadi angin segar bagi kerukunan umat beragama di Indonesia. Apresiasi yang sama juga diberikan Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan. Namun, Halili mewanti-wanti agar Menteri Agama tidak goyah dengan desakan pihak-pihak yang menolak rencana tersebut. Ia bahkan menyarankan agar Menag segera menuangkan kebijakan tersebut dalam PP atau Perpres. Halili kemudian menekankan, negara melalui Kemenag harus mengakomodasi kebutuhan seluruh agama termasuk agama lokal sebab perlindungan bagi warga merupakan mandat konstitusi.

Berita Selengkapnya (1)

Berita Selengkapnya (2)

Anggota Legislatif: Pro dan Kontra

Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily, mengungkapkan dukungannya terhadap rencana Menag Yaqut untuk mengembangkan fungsi KUA asal dilakukan dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang cukup dan kesiapan regulasi yang matang. Ace

menambahkan, pengembangan tugas pokok dan fungsi KUA sebagai kantor pelayanan persoalan lintas agama perlu dilakukan tidak hanya dalam pelayanan administrasi terkait pernikahan saja, tetapi juga bimbingan keagamaan dalam konteks yang lain. Sejalan dengan itu, Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKB Luqman Hakim juga memastikan pihaknya mendukung rencana tersebut. Menurut Luqman, sentralisasi ini program penting untuk menciptakan sistem data tunggal pernikahan dan meminimalisir potensi pemalsuan data pernikahan yang telah banyak terjadi sebelumnya. Masalah pencatatan pernikahan ini harus menjadi program prioritas Kementerian Agama sebab sebagai instansi urusan keagamaan, KUA seharusnya melayani kebutuhan seluruh warga dari beragam agama. Namun, pada sisi yang lain, anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, berbeda dari fraksi Golkar dan PKB. Ia menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana transformasi KUA sebagai tempat pencatatan nikah semua agama. Menurut Hidayat, rencana kebijakan tersebut tidak sesuai dengan filosofi sejarah KUA di Indonesia, tidak sesuai dengan amanat UUD 1945 yang mengamanatkan negara untuk menjamin agar penduduk beribadah menurut kepercayaan masing-masing, dan justru dapat menimbulkan masalah sosial, beban psikologis dan ideologis di kalangan non-Islam. Selama ini, tuturnya, pencatatan pernikahan muslim di KUA dan non-muslim di pencatatan sipil sudah berjalan baik sebagaimana mestinya dan tidak perlu diubah sebab belum ada penolakan yang berarti. Hidayat menegaskan, KUA merupakan institusi yang berada di bawah Ditjen Bimas Islam yang tugasnya memang mengurusi umat Islam saja, sehingga mengubah peraturan tersebut hanya akan menimbulkan disharmoni.

Berita Selengkapnya (1)

Berita Selengkapnya (2)

Pemerintah: Terobosan Positif

Pihak Kementerian yang juga berada di barisan pendukung Kemenag salah satunya adalah Kementerian Hukum dan HAM. Dhahana Putra menilai rencana Kemenag merupakan terobosan positif yang dapat mempermudah akses layanan publik bagi seluruh masyarakat. Ia lebih lanjut juga menyebutkan catatan yang penting untuk dikaji demi keberlanjutan rencana tersebut. Aspek pertama yang perlu ditinjau ulang adalah regulasi, berkaitan dengan bagaimana kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan baik, sederhana, tetapi tepat dan praktis. Kedua, mengenai birokrasi sebab pengalihtugasan KUA sebagai pencatatan semua agama akan mempengaruhi struktur kerja

dinas pencatatan sipil yang selama ini telah berjalan. Selain itu, yang ketiga adalah kajian pada aspek sosiologis. Menurut Dhahana, penyusunan peraturan perundang-undangan harus menggunakan setidaknya indikator inklusivitas, kesetaraan, nondiskriminatif, serta aksesibilitas pelayanan. Untuk melakukan pengkajian ini, Direktora Jenderal HAM menyatakan kesiapannya mendampingi Kemenag untuk segera melaksanakan revitalisasi regulasi tersebut. Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Efendi, menyampaikan dukungannya terhadap Menteri Agama sebab menurutnya KUA memang seharusnya melayani urusan seluruh agama bukan hanya agama tertentu saja. Kantor KUA juga perlu membuat aula-aula yang dapat digunakan untuk melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, Muhadjir menambahkan, transformasi fungsi KUA hanya persoalan teknis, sehingga pelaksanaan kebijakan ini tidak perlu merevisi undang-undang. KUA secara administratif berada di bawah Dirjen Bimas Masyarakat Islam, tetapi secara fungsional dapat mengurusi semua agama.

Berita Selengkapnya (1)

Berita Selengkapnya (2)

Lembaga Agama: antara Setuju dan Pesimisme

Ketua Hukum dan HAM Parisada Hindu Dharma Indonesia, Yanto, menyampaikan persetujuannya atas usulan Menteri Agama. Ia juga mengusulkan agar Menag mengangkat satu orang dari masing-masing agama untuk menjadi petugas pencatatan di setiap kecamatan, agar pengurusan administrasi lebih cepat dan dekat. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat konsensus penganut agama di masing-masing kecamatan kemudian menunjuk dari setiap perwakilan agama untuk bertugas di kantor KUA kecamatan. Dengan demikian, maka Menteri Agama perlu meninjau tidak hanya peraturan baru yang akan dibuat tetapi juga harmonisasi peraturan tersebut dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya. Sementara, PGI pesimis dengan wacana Menag tersebut. Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Henrek Lokra, menyatakan bahwa rencana tersebut perlu dipertimbangkan kembali secara lebih matang sebab pernikahan pada dasarnya merupakan urusan privat bagi agama Kristen. Lebih lanjut, Henrek berpendapat sudah benar negara mengatur administrasi kependudukan, sementara gereja bertugas memberkati pernikahan, sehingga pengalihan wewenang

pencatatan pernikahan ke KUA perlu mempertimbangkan aspek-aspek yang lebih kompleks. Penolakan serupa datang dari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, yang mengatakan adanya dua permasalahan dalam rencana tersebut, yakni mengenai pencatatan dan tempat penyelenggaraan acara pernikahan. Persoalan tersebut sudah diatur Undang-Undang dan berjalan dengan baik tanpa masalah selama beberapa dekade. Anwar Abbas menyayangkan jika struktur yang sudah baik tersebut harus diubah. Perubahan yang direncanakan Kemenag justru akan membuat huru-hara tidak hanya dikalangan masyarakat tetapi juga pembuatan regulasi dan pengaturan organisasi itu sendiri. Anwar Abbas lebih lanjut menyebutkan, tugas menteri seharusnya menciptakan perdamaian dan ketertiban, tetapi Menag Yaqut justru kerap membuat kegaduhan dalam masyarakat. Ia juga menyangsikan sikap Menag yang melayangkan gagasannya ke publik tanpa menemui terlebih dahulu para pemuka agama.

Berita Selengkapnya (1)

Berita Selengkapnya (2)

Berita Selengkapnya (3)

PENOLAKAN BANSER TERHADAP PENGAJIAN SALAFI

KERUKUNAN umat beragama dan berkeyakinan selayaknya harus dijunjung tinggi di negara ini. Negara yang memiliki diversitas sosial keagamaan ini perlu dirawat dengan sikap toleransi antarkelompok untuk menciptakan harmoni di masyarakat. Sayangnya, pemberitaan terbaru tentang pembubaran pengajian Salafi oleh Banser di Surabaya mencoreng hak kebebasan beragama. Terlebih pihak yang membubarkan adalah bagian dari Nahdlatul Ulama yang dikenal sebagai organisasi toleran di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa toleransi antarsesama agama pun masih ada catatan merah. Penolakan ini bukan hal baru oleh kelompok Salafi, di banyak tempat mereka juga mengalami penolakan Banser. Pada laporan berita ini menampilkan ulasan berita yang termuat di media massa tentang respons pembubaran pengajian safari Ustaz Syafiq Riza Basalamah di Surabaya pada akhir Februari dan awal Maret 2024.

Kericuhan antara Banser dan Jamaah Salafi

Pada akhir bulan Februari 2024, berita penolakan Banser terhadap pengajian Salafi kembali mencuat ke publik. Penolakan ini terjadi di Masjid Assalam Purimas di Kota Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan informasi yang beredar, pengajian tersebut akan dihadiri oleh salah satu tokoh Salafi, Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Sebelum terjadi kericuhan di masjid, pihak Banser sudah mengirimkan surat keberatan terhadap panitia penyelenggara terkait mengundang sang ustaz. Pihak Banser menilai bahwa ustaz tersebut sering mengkritik ritual keagamaan jamaah Nahdlatul Ulama yang, menurut Banser, dapat memecah belah umat beragama. Walaupun kejadian ini berakhir salah paham karena pihak panitia tidak jadi mengundang Ustaz Syafiq, kericuhan antara Banser dan Jamaah sempat terjadi. Ibnu Arly, Ketua Dewan Yayasan Masjid Assalam, mengatakan bahwa Ustaz Syafiq tidak jadi hadir dan terdapat miskomunikasi antara anggota Banser dengan panitia penyelenggara.

Berita Selengkapnya

MUI Menyayangkan Baku Hantam Banser dan Jamaah Ustaz Syafiq Riza Basalamah

Penolakan Banser terhadap kajian yang rencananya akan didatangi Ustaz Syafiq Riza Basalamah diwarnai baku hantam. Jamaah yang tidak terima terhadap perilaku Banser yang menghentikan paksa kajian di Masjid Assalam melakukan perlawanan dengan kontak fisik. Mendengar berita itu, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI Pusat, Kiai Cholil Nafis, menyayangkan peristiwa itu terjadi. Menurutnya, sesama umat Islam seharusnya saling menghormati satu sama lain, baik massa dari GP Ansor dan Jamaah Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Cholil Nafis juga berpesan kepada kelompok-kelompok Islam untuk menjaga ukhuwah dengan mengetahui peta dakwah yang dibutuhkan umat. Dia berharap peristiwa yang terjadi pada 22 Februari 2024 tersebut tidak terulang kembali.

Berita Selengkapnya

Respons Tokoh Muhammadiyah terhadap Kerusuhan Banser dan Jamaah Ustaz Syafiq Riza Basalamah

Hak kebebasan beragama di Indonesia kembali menorehkan tinta merah. Kali ini terjadi tidak antarumat agama yang berbeda, melainkan antarkelompok agama Islam. Pembubaran kajian oleh Banser kepada jamaah Ustaz Syafiq Riza Basalamah mengindikasikan bahwa sikap penanganan terhadap perbedaan masih konfrontatif. Kejadian yang berlangsung pada akhir bulan Februari ini memperoleh atensi luas. Salah satunya dari tokoh Muhammadiyah Jawa Timur, Solikhul Huda. Menurutnya, kelompok NU, salafi, dan Muhammadiyah perlu ruang-ruang perjumpaan untuk saling bertukar pikiran dan membangun relasi sosial agar meminimalisir kecurigaan satu sama lain. Dia juga menekankan bahwa esensi pengajian adalah untuk menebarkan ilmu, seyogyanya saling memahami adanya perbedaan interpretasi yang muncul.

Berita Selengkapnya

Geliat Banser Terus Menolak Kajian Safari Ustaz Syafiq Riza Basalamah di Surabaya

Pengajian Ustaz Syafiq Riza Basalamah kembali ditolak di Surabaya. Beberapa hari sebelumnya, pihak GP Ansor melalui personil Banser telah berhasil mengintervensi kajian Ustaz Syafiq di Masjid Assalam. Satu minggu kemudian Banser juga menolak diselenggarakannya kajian yang dihadiri Ustaz Syafiq di Masjid Al-Islah Surabaya pada 2 Maret 2024. Alasan utama penolakan adalah rasa geram dari GP Ansor terhadap isi ceramah Ustaz Syafiq

yang kerap menyerang amalan ibadah warga Nahdliyiin dengan label bid'ah, syirik, dan kafir. Oleh karena hal tersebut dapat menimbulkan perpecahan antarumat Islam, Achmad Choirun, Pimpinan Anak Cabang GP Ansor dan Satuan Koordinasi Rayon Banser Krembangan Kota Surabaya, menilai permasalahan penolakan kedatangan Ustaz Syafiq Riza Basalamah yang pernah terjadi di Gunung Anyar belum kondusif. Mereka mengkhawatirkan bila pengajian tersebut tetap terlaksana akan menimbulkan kericuhan seperti kejadian yang pernah terjadi di Gunung Anyar pada Februari lalu.

Berita Selengkapnya

Banser Terus "Slepet" Kajian Salafi. Kebebasan Beragama Dibatasi?

Kajian Ustaz Riza Basalamah di Masjid Al-Ikhlas, Perak Barat, Surabaya, Jawa Timur, sempat diwarnai penolakan GP Ansor melalui personil Banser akhirnya berjalan setelah melalui mediasi dengan takmir dan pengurus masjid pada 2 Maret 2024. Penolakan tersebut didasari rasa keberatan GP Ansor terhadap isi ceramah Ustaz Syafiq yang dinilai provokatif terhadap amaliyah Nahdlatul Ulama. Sutaryono, Ketua Yayasan Masjid Al-Ikhlas, menyatakan adanya komitmen dengan GP Ansor terkait isi ceramah dan bertanggung jawab atas ketertiban serta keamanan masyarakat selama pengajian dilaksanakan. Berbeda dengan pernyataan tersebut, Kepala Satuan Koordinasi Cabang Banser Kota Surabaya, Deni Susandi, mengatakan alasan GP Ansor menoleransi pengajian tersebut karena pihak Yayasan Masjid mengakui adanya kesalahan administratif, sehingga GP Ansor menoleransi pengajian hingga tuntas.

Berita Selengkapnya

UNIVERSITAS GADJAH MADA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI AGAMA
DAN LINTAS BUDAYA

MONTHLY UPDATE ON RELIGIOUS ISSUES IN INDONESIA | APRIL 2024

Pemimpin Redaksi: M. Iqbal Ahnaf | **Redaktur Pelaksana:** Budi Asyhari, Nur Rif'ah Hasaniy | **Redaktur Artistik:** Iis Badriatul M | **Tim Redaksi:** M. Iqbal Ahnaf, Budi Asyhari, Muhammad Syihabuddin Annur, Ayu Hafidhoh Ihsaniyah, Nur Rif'ah Hasaniy, Theophila Krisna Modesty.